

IMPLEMENTASI PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DI KELURAHAN DALAM BUGIS KECAMATAN PONTIANAK TIMUR KOTA PONTIANAK

Oleh :

DIAH INDRI SARI^{1*}

NIM. E1011141084

Dr. Hj. Hardilina, M.Si², Dr.H. Pardi, M. AB²

*Email: diahindrisari@gmail.com

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.

ABSTRAK

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan mengenai Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak. Persoalan mengenai Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang terjadi di daerah tersebut cukup menarik untuk diteliti karena berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikota Pontianak, luas perumahan kumuh dan pemukiman kumuh di Kelurahan Dalam Bugis Kawasan Tanjung Pulau sudah rampung sehingga mencapai 0,00 Ha. Namun, jika melihat realita di lapangan masih terdapat kekumuhan. Penelitian ini menggunakan menggunakan pendekatan kualitatif dengan model penelitian deskriptif. Peneliti mencari informasi melalui teknik wawancara dengan narasumber, observasi ke wilayah penelitian, dan teknik dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kota Pontianak belum sepenuhnya berhasil mengingat keefektifan Komunikasi, Sumber daya yang belum optimal, Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan yang masih acuh, dan Struktur Birokrasi yang belum sepenuhnya terlaksana. Saran, dengan hasil penelitian ini diharapkan Pemerintah Kota Pontianak agar lebih mengawasi langsung keadaan di wilayah termasuk ke dalam Program KOTAKU bukan hanya melihat dari nilai yang didapatkan dari pengawas di lapangan, agar tidak ada lagi sarana dan prasarana yang terlewat pembangunannya. Dengan begitu Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) keberhasilannya tidak hanya dilihat dari hasil penilaian namun juga berhasil sesuai realitanya.

Kata kunci : Implementasi, Program, Kota Tanpa Kumuh, KOTAKU

A. PENDAHULUAN

Berkenaan dengan beberapa masalah-masalah permukiman, Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) mulai dicanangkan oleh Pemerintah Pusat melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 di dalam buku Agenda Pembangunan Nasional yang diterbitkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2014 yang mengamanatkan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan melalui penanganan kualitas lingkungan permukiman, peningkatan kualitas permukiman kumuh, pencegahan tumbuh kembangnya permukiman kumuh baru, dan penghidupan yang berkelanjutan.

Tujuan program KOTAKU adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. Pencapaian tujuan program diukur dengan merumuskan indikator kinerja penunjang keberhasilan dan target pencapaian program yang akan berkontribusi terhadap tercapainya sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) yaitu pengentasan permukiman kumuh perkotaan.

Kelurahan Dalam Bugis Lokasi Tanjung Pulau mendapat perhatian khusus dari Pemerintah, karena permukiman masyarakat sebagian besar terletak di tepian sungai Kapuas. Sehingga pemerintah melakukan penataan kawasan permukiman tepian Kapuas dengan

tujuan untuk mengurangi tingkat kekumuhan. Berikut ini merupakan lokasi perumahan kumuh dan pemukiman kumuh di kota pontianak Kelurahan Dalam Bugis Lokasi Tanjung Pulau Kecamatan Pontianak Timur tahun 2015-2019 :

Tabel 1.2: Lokasi Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh Di Kota Pontianak Kelurahan Dalam Bugis Lokasi Tanjung Pulau Kecamatan Pontianak Timur berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikota Pontianak Tahun 2015-2019

Tahun SK	Nmor SK	Luas (Ha) Pengurangan Kumuh
2015	398/D-CKTRP.TAHUN 2015	4.74 Ha
2016	465/D-CKTRP.TAHUN 2016	4.74 Ha
2017	367/D-PRKP.TAHUN 2017	4.43 Ha
2018	201/D-PRKP.TAHUN 2018	2.05 Ha
2019	867/D-PRKP.TAHUN 2018	0,00 Ha

Sumber: SK Walikota Kota Pontianak, Tahun 2015-2019

Pada Tabel 1.1 tingkat kekumuhan di Kelurahan Dalam Bugis Lokasi Tanjung Pulau berubah seiring dilakukannya proses pembangunan. Adapun luas lokasi kumuh yang ditentukan pada awal penentuan lokasi kumuh seluas 4,74 Ha pada tahun 2015 dan luas lokasi pada tahun 2016 tidak berubah. Namun mengalami peningkatan pembangunan sebesar 0,31 Ha sehingga pada tahun 2017 luas lokasi yang akan dilakukan pembangunan menjadi 4,43 Ha. Sedangkan pada tahun 2018 tingkat kekumuhan semakin berkurang sebanyak 2,38 Ha sehingga luas lokasi yang akan dibangun menjadi 2,05. Sementara

pada tahun terakhir program KOTAKU tahun 2019 lokasi kumuh berkurang 2.05 Ha dan lokasi kumuh terakhir menjadi 0,00 Ha.

Penjabaran atas tujuan Program KOTAKU adalah memperbaiki akses masyarakat terhadap infrastruktur permukiman sesuai dengan 7 + 1 indikator kumuh, penguatan kapasitas pemerintah daerah untuk mengembangkan kolaborasi dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*), dan memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan kehidupan berkelanjutan (*sustainable livelihood*). Indikator tersebut adalah:

1. Bangunan Gedung
2. Jalan Lingkungan
3. Penyediaan Air Minum
4. Drainase Lingkungan
5. Pengelolaan Air Limbah
6. Pengelolaan Persampahan
7. Pengamanan Kebakaran
8. Ruang Terbuka Publik

Dalam rangka mencapai tujuan dari kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan pemerintah tersebut maka kebijakan itu harus diimplementasikan sebaik-baiknya agar mendapatkan hasil yang maksimal. Dalam mengamati proses Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Lokasi Tanjung Pulau Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, Peneliti merujuk pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Pontianak No. 11 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Dalam hasil laporan lokasi perumahan kumuh dan pemukiman kumuh di Kota Pontianak

Kelurahan Dalam Bugis lokasi Tanjung Pulau Kecamatan Pontianak Timur yang tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Walikota Pontianak sudah mencapai angka 0,00 Ha.

Hal tersebut menyatakan bahwa tingkat kekumuhan yang terdapat di Kelurahan Dalam Bugis Lokasi Tanjung Pulau sudah rampung. Namun, dalam realitanya terdapat masalah-masalah yang dialami diantaranya terdapat Sanitasi yang buruk disebabkan perilaku masyarakat yang membuang sampah sembarangan terutama di sungai sehingga pada saat kondisi surut, sampah menumpuk di sekitar pemukiman pinggir sungai bahkan dibawah kolong rumah karena tidak bisa keluar dari pemukiman masyarakat. Selain itu, kondisi lingkungan yang berada dipinggiran sungai Kapuas memaksa masyarakat untuk membuang air besar (BAB) langsung ke Sungai dikarenakan tidak bisa membuat *Septic Tank* dan masyarakat sulit menghindari genangan air di lingkungan tersebut.

Walaupun dari Program KOTAKU sendiri sudah menyediakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), yaitu sebuah struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut untuk digunakan pada aktivitas lain. Namun IPAL tersebut belum dapat berfungsi dengan baik dikarenakan dari pihak pemerintah tidak membangun IPAL untuk seluruh Kartu Keluarga (KK) yang ada di Lokasi Tanjung Pulau. Sehingga masyarakat yang tidak mendapatkan IPAL tetap BAB dan BAK langsung ke sungai. Selain

itu, saluran IPAL yang terdapat di lingkungan sekitar masih belum berfungsi.

Permasalahan air bersih juga menjadi kendala keberadaan PDAM di Lokasi Tanjung Pulau Kelurahan Dalam Bugis masih langka digunakan, karena PDAM belum bisa beroperasi secara maksimal. Hal tersebut terjadi dikarenakan tidak sedikit masyarakat yang menggunakan air sungai Kapuas untuk mandi dan keperluan lainnya, sehingga masyarakat tidak memikirkan perlu untuk menggunakan PDAM. Untuk bisa menggunakan PDAM juga membayar, masyarakat lebih memilih menyedot air sungai Kapuas menggunakan mesin air atau langsung mandi di Sungai.

Kondisi tempat tinggal penduduk yang padat dan jalan yang sempit juga menjadi permasalahan yang dialami masyarakat, sehingga sulit dilakukan pelebaran jalan. Hal ini diungkapkan oleh Koordinator KOTAKU Kota Pontianak Bapak Iskandar yang mengatakan, "Pemukiman penduduk disana itu cukup padat dan jalannya juga sempit sehingga lumayan sulit untuk kita bangun. Itu menjadi PR kami khususnya Tim KOTAKU yang masih mencari cara agar pembangunan tetap dilakukan dengan merata sehingga tidak ada lagi wilayah yang tertinggal".

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Proses Implementasi Kebijakan

Proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program

dan menimbulkan ketaatan pada kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat. Solichin Abdul Wahab (2004:65).

Menurut George Edward III dalam Agustino (2016:136-141) terdapat 4 variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi

Menurut George C. Erward III (dalam Agustino 2016 : 137-138) komunikasi menurutnya, sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan(ataudikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten dalam masyarakat. Berdasarkan dari sumber terpercaya yang peneliti dapatkan bahwa komunikasi dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dilakukan dalam bentuk sosialisasi yang diadakan oleh pemerintah terkait awal mula Program KOTAKU akan dilaksanakan, sosialisasi tersebut memperkenalkan mengenai Program KOTAKU, musyawarah dan rapat dengan pihak-pihak terkait dalam Program

KOTAKU perihal perencanaan dan pelaksanaan di Kelurahan Dalam Bugis dan komunikasi lain via handphone dan surel terkait progress dari Program KOTAKU tersebut.

2. Sumber Daya

Menurut George C. Edward III (dalam Agustino 2016:138-139) diperoleh sumber daya yaitu hal penting lainnya yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Sumber daya dapat diukur dari aspek kecukupan yang di dalamnya tersirat kesesuaian dan kejelasan. Dalam implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Meskipun komunikasi oleh pelaksanaan kebijakan berjalan dengan baik, jika terdapat kekurangan atau permasalahan terhadap sumber-sumber yang mendukung maka implementasi kebijakan cenderung tidak efektif. Di dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), sumber daya yang dimiliki dinilai sudah mencukupi kategori untuk menuai keberhasilan. Namun hal tersebut bukanlah penunjang untuk tercapainya tujuan dari sebuah kebijakan.

3. Disposisi

Disposisi merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan

maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius. Bentuk penolakan dapat bermacam-macam seperti yang dikemukakan Edward III tentang "zona ketidakacuhan" dimana para pelaksana kebijakan melalui keleluasaannya (diskresi) dengan cara yang halus menghambat implementasi kebijakan dengan cara mengacuhkan, menunda dan tindakan penghambatan lainnya.

4. Struktur Birokrasi

Dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation prosedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan seperti SOP yang di buat oleh Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menjadi pedoman bagi organisasi atau lembaga yang terkait dalam SOP tentunya menuliskan mengenai peran dari masing-masing pihak yang terkait dalam program KOTAKU agar implementor tidak keluar dari bidangnya.

2. Hasil Penelitian Yang Relevan

Sebagai bahan referensi bagi peneliti dalam penelitian ini peneliti mencoba melihat penelitian terdahulu

yang telah dilakukan beberapa peneliti sebelumnya. Dan hasil dari penelitian yang telah peneliti sebelumnya dilakukan itu dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dengan yang akan dilakukan penulis laksanakan. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dapat dilihat dari beberapa hasil penelitian yang relevan.

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Dewi Zulyanti (2017) Dengan Judul Implementasi Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) Sebagai Model Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat Di Kelurahan Negeri Olok Gading Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung.

Penelitian kedua dilakukan oleh Sahria Apriliana (2018) dengan judul Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Persamaan kedua penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang peneliti kaji adalah, sama-sama mengkaji mengenai implementasi program dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Adapun perbedaannya yaitu lokasi penelitian, yang mana penelitian yang peneliti lakukan berlokasi di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Sedangkan kedua penelitian tersebut mengambil lokasi penelitian di Lampung dan Balikpapan.

3. Kerangka Pikir Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang disusun dalam rangka pengentasan permukiman kumuh

yang berkelanjutan . Berdasarkan fenomena yang terjadi masalah dalam penelitian ini yaitu realita di lapangan tidak sesuai dengan data terakhir di lapangan yang dinyatakan berhasil. Dengan adanya identifikasi tersebut penulis menggunakan teori implementasi kebijakan publik menurut George C. Edward III dalam Agustino (2016:136) yaitu: Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Struktur birokrasi. Tujuannya untuk mewujudkan kesuksesan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

C. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian dengan judul “Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak” menggunakan pendekatan kualitatif dan memakai Metode Deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitiannya misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara holitis dengan cara deskripsi dalam bentuk kata kata dan bahasa. Pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah dengan pendekatan kualitatif maka data yang diperoleh lebih lengkap, lebih mendalam dan bermakna sehingga tujuan peneliti dapat di capai.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Pengertian metode deskriptif sebagaimana tulis oleh Moh. Nazir (1989:63) yang dikutip oleh Andi Prastowo (2011:201-202) adalah metode yang dalam meneliti status kelompok manusia, suatu

objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun kelas peristiwa pada masa sekarang. Maksud “pada masa sekarang” di sini merupakan sebuah gambaran bahwa perspektif waktu yang dijangkau dalam penelitian ini adalah waktu sekarang atau sekurang-kurangnya jangka waktu yang masih terjangkau dalam ingatan responden. Maka dalam penelitian ini, data dan kesimpulan yang dihasilkan merupakan gambaran apa adanya tentang pembangunan yang dilakukan dalam program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) pada masa waktu sekarang atau pada masa waktu dilakukan penelitian.

1. Langkah-langkah Penelitian

Langkah pertama dari penelitian ini yaitu peneliti menentukan topik permasalahan terlebih dahulu setelah permasalahan dirumuskan selanjutnya peneliti mengumpulkan data dilapangan yaitu dengan menyiapkan pedoman wawancara yang berisi daftar pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada responder untuk mendapatkan data, selain itu juga perlu menyiapkan dokumentasi dan alat tulis untuk melakukan pencatatan dan dokumentasi sebagai hasil dari observasi. Setelah peneliti mendapatkan data yang cukup di lapangan selanjutnya peneliti melakukan pengolahan data dari data yang di peroleh dari lapangan.

Pengolahan atau menganalisis data dilakukan dengan editing yaitu meninjau kembali data yang diperoleh apakah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Adapun yang di tinjau kembali yaitu kelengkapan, konsistensi, ketepatan, keseragaman, dan relevansi. Selanjutnya peneliti menarik kesimpulan atas

permasalahan yang telah dirumuskan.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Jl. Tanjung Pulau Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak. Penelitian ini dilakukan mulai Oktober 2018 sampai dengan November 2019.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini terdiri dari Masyarakat, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Tim Koordinator KOTAKU Kota Pontianak, Kelurahan Dalam Bugis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk melengkapi hasil penelitian ini, penulis memerlukan data sebagai pendukung keseluruhan terhadap penulisan skripsi ini dalam mencari dan mengumpulkan data-data tersebut,

penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

a. Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung pada tempat penelitian dilaksanakan berkaitan dengan fokus penelitian, dilakukan pada saat pengamatan berlangsung.

b. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dan mendalam kepada subjek penelitian.

c. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data tertulis melalui dokumen pribadi dari peneliti, buku pendapat, teori atau buku sosial yang berhubungan dengan tema penelitian.

5. Instrumen Pengumpulan Data

Nasution, 1988 (dalam Sugiyono 2017, 223) menyatakan, dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah bahwa, segala sesuatunya belum memiliki bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya.

6. Analisi Data

Penelitian ini adalah penelitian deskripsif, dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Menurut Patton (Moleong, 2004:103) analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, katagori dan uraian dasar. Definisi tersebut memberikan gambaran tentang betapa pentingnya kedudukan analisis data dilihat dari segi tujuan penelitian. Prinsip pokok penelitian kualitatif adalah menemukan teori dari data. Teknik analisis data yang digunakan penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Burhan Bungin (2003:70) yaitu Pengumpulan Data, Reduksi Data, dan Verifikasi Data.

D. GAMBARAN UMUM

1. Gambaran Umum Kelurahan Dalam Bugis

Kelurahan Dalam Bugis merupakan salah satu kelurahan yang masuk dalam wilayah Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, Dengan luas Wilayah 198 HA.

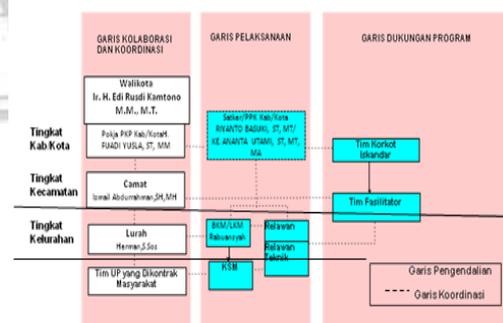
Obritas jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan 2 km, jarak dari pusat pemerintahan Kota 3 km. Berdasarkan data monografi di Kelurahan Dalam Bugis jumlah laki-laki, 9.656 (jiwa) dan jumlah perempuan, 9.5692 (jiwa).

2. Organisasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) adalah satu dari sejumlah upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung “Gerakan 100-0-100”, yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak.

Arah kebijakan pembangunan Dirjen Cipta Karya adalah membangun sistem, memfasilitasi pemerintah daerah, dan memfasilitasi komunitas (berbasis komunitas). Program Kotaku akan menangani kumuh dengan membangun *platform* kolaborasi melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat.

Gambar 4.2
STRUKTUR UNIT PENGELOLA KEGIATAN



Sumber: Tim Koordinator KOTAKU Kota Pontianak 2019

E. PEMBAHASAN DAN HASIL

1. Proses Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Dilihat Dari Aspek Komunikasi

Berdasarkan pernyataan dari berbagai sumber, dalam program KOTAKU di Kelurahan Dalam Bugis Lokasi Tanjung Pulau, Komunikasi dilakukan dengan berbagai cara yaitu sosialisasi, musyawarah dan rapat. Sosialisasi dilakukan secara langsung, saat pertama kali Program KOTAKU akan dilaksanakan dan dalam sosialisasi tersebut disampaikan mengenai Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), dalam sosialisasi tersebut dihadiri oleh masyarakat serta pihak-pihak terkait. Sementara dalam musyawarah dan rapat hanya dihadiri oleh pihak-pihak terkait tanpa melibatkan masyarakat umum. Sehingga masyarakat merasa terabaikan karena tidak diturut sertakan dalam musyawarah dan rapat tersebut. Komunikasi dalam Program KOTAKU antara pembuat kebijakan dan implementor sudah berjalan dengan baik, namun komunikasi antara implementor dan sasaran kebijakan belum efektif dikarenakan masih ada fenomena-fenomena yang mana hal tersebut diakibatkan dari adanya miss komunikasi antara implementor dan sasaran kebijakan.

2. Proses Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Dilihat Dari Aspek Sumber daya

Sumber daya yang ada dalam Program Kota Tanpa Kumuh belum optimal, hal tersebut bisa dinilai dari dana yang terbatas sehingga ada salah satu 7+1 indikator kumuh yang tidak dapat dilaksanakan pembangunannya dikarenakan keterbatasan dana hal tersebut tentu berpengaruh bagi

keberhasilan Program KOTAKU karena Program ini sudah terencana dengan matang namun masih terkendala dengan dana. Selain itu, Sumber daya manusia yang disediakan belum optimal hal tersebut dinilai dari hasil pembangunan dari kontraktor yang menangani Program KOTAKU bahwa hasil barau yang dibangun tidak rapi dalam kata lain tidak kokoh tancapannya ke tanah sehingga masih bergerak-gerak dan pemasangannya tidak rapat sehingga sampah dari sungai masuk dari celacela barau yang tidak rapat jadi sampah-sampah tersebut jadi menumpuk di bawah rumah masyarakat. Selain itu, adanya pembangunan IPAL dengan tujuan untuk mengurangi pencemaran lingkungan namun IPAL tersebut belum optimal dengan baik dikarenakan masih menimbulkan bau sehingga mengganggu masyarakat sekitar.

3. Proses Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Dilihat Dari Aspek Disposisi

Sikap dari pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan dari suatu Kebijakan/Program, jika pelaksana kebijakan bersifat acuh hal tersebut akan memperlama proses dari Kebijakan/Program itu sendiri atau Kebijakan tersebut dapat selesai namun tidak optimal. Seperti pemasangan IPAL yang tidak merata karena dari 560 KK masih tersisa 56 KK yang tidak terpasang IPAL selain itu IPAL tersebut masih belum berfungsi jadi adanya selang besar untuk menyalurkan limbah biologis dan kimiawi hanya menjadi pajangan dan terkesan menghamburkan anggaran. Salah satu alasan

diadakannya Program KOTAKU adalah adanya 7+1 indikator kumuh, namun jika beberapa darinya tidak terlaksana pengadaannya apakah Program KOTAKU masih bisa dikatakan berhasil, indikator tersebut adalah penyediaan air minum, drainase lingkungan, dan pengamanan kebakaran. Hal tersebut menjadikan implementor terkesan tidak merencanakan Program KOTAKU dengan matang. Dan masyarakat mengharapkan solusi apabila terjadi kebakaran, karena selang yang disediakan bisa digunakan apabila air sungai pasang dan ketika surut tidak bisa digunakan. Hal tersebut juga dianggap urgent bagi masyarakat mengingat beberapa hari sebelum peneliti turun ke lapangan, beberapa rumah telah warga dilalap api.

4. Proses Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Dilihat Dari Aspek Disposisi Struktur Birokrasi

Dari struktur birokrasi hal utama yang harus diadakan adalah SOP, agar kerja menjadi lebih terarah sesuai pedoman dan sesuai dengan porsinya. Dalam program KOTAKU sendiri mulain dari kewajiban dan wewenang dari implementor sudah jelas tertera dalam SOP. Namun, mengenai sarana dan prasarana yang sudah berhasil dibangun, masih ada beberapa yang tidak sesuai dengan SOP, yaitu pembangun jalan lingkungan yang seharusnya 3 meter yang tertera dalam SOP karena kepadatan bangunan dan keadaan lingkungan jadi hanya bisa dibangun 1 ampai 1,5 meter saja. Juga, 7+1 indikator yang tidak dibangun juga tidak sesuai dengan SOP, karena indikator tersebut dijadikan patokan untuk keberhasilan Program

KOTAKU.

F. PENUTUP

1. Kesimpulan

a. *Komunikasi* dalam Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dapat disimpulkan sudah terlaksana dengan baik dari Pembuat Kebijakan kepada implementor (Pemerintah Kota Pontianak, Tim Koordinator KOTAKU Kota Pontianak, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan Kelurahan). Implementor juga sudah melakukan komunikasi yang baik kepada masyarakat dengan cara sosialisasi, musyawarah dan rapat, tetapi komunikasi dari implementor kepada masyarakat masih belum efektif dikarenakan komunikasi dalam bentuk sosialisasi hanya dilakukan pada saat pertama kali Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) akan diadakan di Kelurahan Dalam Bugis, sehingga optimalisasi dari komunikasi dalam bentuk sosialisasi belum tercapai secara maksimal. Sementara dalam bentuk lain seperti musyawarah/rapat masyarakat tidak 100% hadir karena hanya dihadiri oleh orang-orang yang terkait saja seperti BKM, KSM/Panitia, perwakilan Kecamatan dan Kelurahan, dan RT/RW, sehingga sebagian dari masyarakat belum mengetahui mengenai Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang telah dirancang oleh Pemerintah. Komunikasi yang dilakukan dalam bentuk Sosialisasi terkait Program KOTAKU ini juga belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat, karena pada saat pembangunan infrastruktur baik

sarana maupun prasarana oleh pemerintah Kota Pontianak masyarakat masih merasa bingung dan tidak mengetahui bagaimana pentingnya menjaga lingkungan dan sarana maupun prasarana yang telah dibangun, hal ini mengisyaratkan bahwa sebenarnya masyarakat belum memahami tujuan dari Program KOTAKU yang telah dikomunikasikan oleh Pemerintah Kota Pontianak melalui sosialisasi.

- b. *Sumber daya* yang terdapat pada saat pelaksanaan Program Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Dalam Bugis sudah dapat memperoleh hasil yang baik dari Pembuat Kebijakan kepada Implementor (Pemerintah Kota Pontianak, Tim Koordinator KOTAKU Kota Pontianak, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan Kelurahan) maupun dari Implementor kepada masyarakat. Namun dalam beberapa yang dihasilkan oleh sumberdaya yang ada dari Implementor kepada sasaran kebijakan (masyarakat) dinilai belum optimal, sebagai contoh hal tersebut bisa dinilai dari semen yang digunakan untuk barau tepian pembatas tanah tidak dipasang dengan baik sehingga masih terlihat tidak rapat sehingga mempermudah sampah masuk dari sungai besar dan sampah-sampah tersebut tidak bisa keluar lagi sehingga akan bertumpuk di bawah rumah masyarakat, semen barau tersebut juga tidak kokoh tertancap didasar sungai sehingga masih bergerak-gerak, hal itu akan membuat jalan yang dibangun di atasnya lama kelamaan akan berdampak tidak baik. Melihat dari

hasil yang lainnya yaitu Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang mengeluarkan bau tidak sedap, walaupun tujuan dari Pemerintah adalah untuk mengurangi Pencemaran lingkungan dari limbah biologis dan kimiawi setidaknya Pemerintah menggunakan metode tambahan lain agar bau dari limbah yang akan diolah tersebut tidak sampai mengganggu aktifitas masyarakat sekitar.

- c. *Disposisi* atau sikap dari pelaksana kebijakan (Implementor) dalam pelaksanaan Program Tanpa Kumuh (KOTAKU) dapat dinilai berhasil jika dilihat dari nilai persentase yang sudah tidak kumuh lagi di dalam SK kumuh yang dikeluarkan oleh Walikota Pontianak nomor 867/D-PRKP.TAHUN 2018 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Di Kota Pontianak Tahun 2019, namun pada kenyataannya masih jauh dari kata tidak kumuh. Karena pemerintah menilai ketidak kumuhan tersebut dari persentase yang akan dinilai oleh pengawas di lapangan. Sikap dari pelaksana kebijakan (Implementor) dinilai acuh lantaran hasil kebijakan dinilai belum sempurna seperti pemasangan alat apabila terjadi kebakaran, walaupun di Kelurahan Dalam Bugis Lokasi Tanjung Pulau ada selang besar untuk air masuk dari sungai ketika kebakaran terjadi namun selang tersebut tidak dapat digunakan ketika air surut. Pemasangan IPAL yang tidak merata juga menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat sekitar, mengapa tidak semua

Kartu Keluarga (KK) di pasang IPAL, hal tersebut lantaran sebelumnya ada 560 KK yang belum terpasang IPAL setelah adanya IPAL yang tersisa menjadi 54 KK yang tidak terpasang IPAL. Hanya Kartu Keluarga (KK) yang dikendaki oleh Pemerintah saja yang dipasang IPAL sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan yang bahkan Tim Koodinator KOTAKU Kota Pontianak yang bertugas di lapangan tidak mengetahui kriteria bagaimana yang di gunakan Pemerintah dalam menentukan pemasangan IPAL di rumah masyarakat. Beberapa indikator kumuh juga tidak dilaksanakan pembangunannya dikarenakan keterbatasan dana dan kondisi lingkungan.

- d. Dari segi *struktur birokrasi* yang mengutamakan pembuatan Standar Operational Procedur (SOP) yang mana tujuannya adalah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Namun setelah proses pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) terdapat hasil yang menyatakan masih ada tugas dari pihak-pihak terkait yang belum berjalan dengan kondusif. Sehingga masih ada msyarakat yang mengutarakan rasa kecewa karena tugas-tugas tersebut dinilai belum berjalan dengan baik lantaran dari hasil-hasil pembangunan dan juga apa yang tertera di SOP tidak sesuai dengan kenyataannya menurut masyarakat. Hasil yang dirasa tidak sesuai dengan SOP adalah ukuran jalan yang seharusnya 3 meter namun karena keadaan lingkungan hal tersebut tidak bisa dilaksanakan

dan ketika pembangunan dilaksanakan hanya bisa dibangun 1 meter – 1,5 meter saja. Dan juga indikator dari kumuh yang termasuk ke dalam SOP tidak dilaksanakan semua untuk pembangunannya. Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan baik mengenai SOP maupun fragmentasi yaitu merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan sehingga Implementasi Kebijakan masih memiliki kekurangan dan hasilnya tidak optimal.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, maka penulis mengemukakan beberapa saran supaya Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) berjalan lebih baik di masa yang akan datang ialah sebagai berikut:

- a. Pemerintah terkait diharapkan mengawasi langsung Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) agar Program dapat berjalan dengan baik, karena peran Pemerintah sangat penting dalam menunjang keberhasilan suatu Kebijakan. Dan aparatur Kelurahan juga siaga dengan cara komunikasi yang kondusif

- dengan masyarakat, sehingga masyarakat tidak menyangka bahwa ini hanya proyek yang uangnya bisa diambil oleh pihak Kelurahan maupun pihak-pihak terkait.
- b. Pemangku kebijakan dalam hal ini Pemerintah Kota Pontianak diharapkan bisa memberikan fasilitas yang lengkap dan lebih memudahkan masyarakat, terutama seperti memberikan tong sampah disetiap sudut agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan. Dan juga selain gerobak sampah, pemerintah juga memberikan jadwal, agar terjadwal yang bertugas membuang sampah di bank sampah karena kebersihan bebas dari sampah adalah tujuan semua pihak termasuk masyarakat. Maka dari itu masyarakat juga harus bekerjasama untuk mewujudkan itu.
- c. Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) harus bisa membawa dampak yang lebih baik terutama membantu pemerintah Kota Pontianak dalam mewujudkan gerakan 100-0-100, yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak.
- d. Pemerintah Kota Pontianak menggalakkan kembali komunikasi yang dilakukan dengan cara sosialisasi, musyawarah dan rapat terkait Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) sehingga kedepan tidak ada lagi masyarakat yang mengabaikan dalam menjaga

lingkungannya.

- e. Pemerintah Kota Pontianak harus mengupayakan indikator kumuh yang sudah tertera di dalam SOP seperti pembuatan drainase, sarana proteksi kebakaran dan juga ketersediaan air minum. Karena indikator tersebut tidak tersentuh sama sekali. Hal tersebut dimaksudkan agar ketidakkumuhan bukan hanya tertera dinilai persentase namun juga dalam bentuk fisik yang terlihat dapat seperti itu.

3. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini ialah kurangnya literatur yang membahas referensi yang dipakai oleh peneliti dikarenakan masih sedikit yang melakukan penelitian tentang Program Tanpa Kumuh (KOTAKU).

G. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab solichin. 2004. *Analisis kebijaksanaan, dari Formulasi Ke implementasi kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Edisi Kedua, Bumi Aksara.
- A.G Subarsono, 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung: Alfabeta.
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Direktorat Jenderal Cipta Karya, 1997, *Kamus Tata Ruang*,

- Edisi I, Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia, Jakarta.
- Dunn, William N., 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta:Gadja Mada University Press.
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2006. *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Edward III, George C.1980. *Implementing Public Policy*, Congressional Quarterly Press, Washington.
- Falih Suaedi dan Bintoro Wardiyanto.2010.*Revitalisasi Administrasi Negara, Reformasi Birokrasi dan E-Governance*.Yogyakarta: Graha Ilmu
- Keban, Yeremias T. 2008. *Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori, dan Isu Edisi Kedua*. Yogyakarta : Gaya Media
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moh. Nazir.1989. *Metode Penelitian*. Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Purwanto, Erwan Agus., dan Sulistyastuti, Dyah Ratih. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik*.Yogyakarta: Gava Media
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Kerjasama UNPAD-IIP.
- Widodo, Joko.2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses Edisi Revisi*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- ### Penelitian
- Zulyanti. Penelitian tahun 2017. Implementasi program kotaku (kota tanpa kumuh) sebagai model pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat di Kelurahan Negeri Olok Gading Kecamatan Teluk Betung Barat Kota
- Sahria Apriliana. Penelitian tahun 2018. “Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) (Studi Tentang Program Pembangunan Drainase dan Sanitasi di Kelurahan Teritip Kota Balikpapan)”dalam eJournal Administrasi Negara, Vol. 6 No